

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Review Penelitian Sejenis

Penelitian terlebih dahulu adalah salah satu referensi yang diambil peneliti. Melihat hasil para peneliti terdahulu yang mana pada dasarnya peneliti mengutip beberapa pendapat yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung peneliti. Tentunya dengan melihat hasil karya ilmiah yang memiliki pembahasan serta tinjauan yang sama.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian sosial dan penelitian komunikasi dengan pendekatan studi strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena suatu teori atau model pengetahuan biasanya akan diikuti oleh teori dan model yang sebelumnya.

Berikut ini merupakan penelitian yang sudah ada dan dijadikan acuan serta bahan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu :

- 1) Rujukan dari jurnal Ali Damsuki Mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo Semarang dengan Judul “STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Implementasi Program PKKP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2018 di Desa Tambakselo, Grobogan) penelitian yang dilakukan oleh Ali Damsuki menggunakan metode studi kasus untuk memperoleh gambaran mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh peserta PKKP 2018.

- 2) Rujukan dari jurnal Angelina Eldaranti Yosta dan Habib Muhsin mahasiswa program studi ilmu komunikasi STPMD APMD Jalan Timoha 317 Yogyakarta dengan judul “KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MELALUI PELESTARIAN BAHASA DAERAH MANUS” penelitian yang dilakukan oleh Angelina Eldaranti Yosta dan Habib Muhsin menggunakan metode analisis data secara kualitatif tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemberdayaan melalui pelestarian bahasa daerah manus di Desa Golo Meni kecamatan Kota Komba Utara Kabupaten Manggarai Timur.
- 3) Rujukan dari Skripsi Julita Putri Sanda mahasiswa universitas sriwijaya prodi ilmu komunikasi dengan judul “STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA SELATAN DI KAMPUNG LAYANG – LAYANG KECAMATAN HILIR BARAT II KOTA PALEMBANG” penelitian yang dilakukan oleh Julita Putri Sanda menggunakan metode kualitatif dengan jenis data deskriptif, teori strategi komunikasi dari Quinn dan Mintzberg tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Selatan Di Kampunh Layang – Layang Kecamatan Hilir Barat ii Kota Palembang.

Tabel 2. 1 Review Penelitian Sejenis

NO	Nama Peneliti dan judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ali Damsuki “STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Implementasi Program PKKPD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2018 di Desa Tambakselo, Grobogan)	Studi kasus kualitatif	penelitian diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Tambakselo kabupaten Grobogan Jawa Tengah telah dilaksanakan dan berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri melalui program PKKPD dan program program desa lainnya.	Menggunakan metode penelitian kualitatif,	Meneliti mengenai implementasi program PKKPD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah tahun 2018 di Desa Tambakselo, Grobogan.

2.	Angelina Eldaranti Yosta dan Habib Muhsin “KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MELALUI PELESTARIAN BAHASA DAERAH MANUS	Metode analisis data secara kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemberdayaan melalui pelestarian bahasa daerah Manus di Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Utara Kabupaten Manggarai Timur dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat Golo Meni dengan efektif	Menggunakan metode penelitian kualitatif, meneliti mengenai komunikasi pemberdayaan.	Meneliti menggunakan metode analisis data dan objek berbeda
----	---	--	---	--	---

3.	Julita Putri Sanda “STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA SELATAN DI KAMPUNH LAYANG – LAYANG KECAMATAN HILIR BARAT II KOTA PALEMBANG”	Metode kualitatif dengan jenis data deskriptif	Hasil penelitian yang lebih condong ke arah penerapan strategi di lapangan dari pada strategi perencanaan di awal.	Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Peneliti meneliti dengan jenis data deskriptif serta memakai teori teori strategi komunikasi dari Quinn dan Mintzberg
----	--	--	--	---	---

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Komunikasi

Manusia tidak bisa sehari pun tanpa berkomunikasi. Dalam kehidupan sosial, setiap orang pasti membutuhkan orang lain untuk tolong – menolong. Melalui proses saling membutuhkan itu manusia perlu berkomunikasi. Begitu pentingnya komunikasi sampai semua kegiatan atau aktivitas manusia memerlukan komunikasi. Tanpa komunikasi tidak akan mencapai pengertian yang sama.

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sekarang ini keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu termasuk karir banyak ditentukan

oleh kemampuan nya berkomunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan baitu itu pesan secara verbal maupun non verbal secara *face to face* maupun melalui media sehingga menimbulkan efek atau *feedback*.

Komunikasi secara etimologis berasal dari perkataan lain “communicatio” istilah ini berasal dari perkatan “communis” yang bearti sama, sama disini maksudnya sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengetahui suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. (Effendy,2003:30).

Menurut Carl I. Hovland yang dikutip Deddy Mulyana dalam ilmu komunikasi suatu pengantar, adalah:

Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsang (biasanya lambanglambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunitae) (2012:68)

Menurut Harold Lasswell yang dikutip oleh Deddy Mulyana dalam Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, adalah:

Cara yan baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: *Who Says What Which Channel To Whom With What Effect?* Atau (Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana). (2012:69)

Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu:

- 1) *Pertama*, sumber (*source*), sering disebut juga pengirim (*sender*), penyandi (*encoder*), komunikator (*communicator*), pembicara (*speaker*) atau

originator. Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi.

- 2) *Kedua*, pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima.
- 3) *Ketiga*, saluran atau media, yakni alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima.
- 4) *Keempat*, penerima (*receiver*), sering juga disebut sasaran/tujuan (*destination*), komunika (*Communicatee*), penyandi – balik (*decoder*) atau khalayak (*audience*), pendengar (*listener*), penafsir (*interpreter*), yakni orang yang menerima pesan dari sumber.
- 5) *Kelima*, efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. (Deddy Mulyana, 2012:69-71) jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah hal yang paling utama dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak mungkin dapat berinteraksi tanpa berkomunikasi. Proses komunikasi pada hakekatnya dapat disimpulkan sebagai proses penyampaian informasi atau pesan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan arti atau makna diantara mereka dan mengubah perilaku orang lain.

2.2.2. Fungsi Komunikasi

Manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, memiliki dorongan ingin tahu, ingin maju dan berkembang, maka salah satu sarannya adalah komunikasi. Karenanya komunikasi merupakan kebutuhan yang mutlak bagi kehidupan manusia. Komunikasi memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kontak tertentu atau dengan mempergunakan sesuatu alat. Banyak komunikasi terjadi dan berlangsung tetapi kadang-kadang tidak tercapai kepada sasarannya tentang apa yang ingin dikomunikasikan itu. Mengapa hal itu terjadi? Tentunya ada bermacam-macam gangguan dan hambatan-hambatan dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik dan efektif.

Menurut Suprpto (Suprpto,11,p.2) kehidupan manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas komunikasi karena komunikasi merupakan bagian integral dari sistem dan tatanan kehidupan sosial manusia dan atau masyarakat. Aktivitas komunikasi dapat terlihat pada setiap aspek kehidupan sehari-hari manusia, yaitu sejak dari bangun tidur di pagi hari sampai dengan manusia beranjak tidur pada malam hari.

2.2.3. Komunikasi Pemberdayaan

Konsep komunikasi pembangunan sudah sangat familiar kita dengar, lalu bagaimana dengan komunikasi pemberdayaan masyarakat? Mungkin ini termasuk konsep baru bagi telinga kita, atau bisa jadi istilah tersebut baru ditemukan melalui tulisan ini? Mengapa perlu ada komunikasi pemberdayaan masyarakat? Seberapa pentingkah konsep komunikasi pemberdayaan masyarakat ini perlu untuk dikembangkan? Seberapa pentingkah dalam implementasinya dalam kegiatan

pembangunan di masyarakat sehingga komunikasi pemberdayaan masyarakat tersebut perlu dikaji dalam tulisan ini? Ataukah memunculkan konsep komunikasi pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mengada – ada dan tidak penting? Bukankah sudah ada komunikasi pembangunan yang barangkali sudah bisa membahas secara lebih luas? Mungkin berbagai pertanyaan lainnya bisa muncul, terutama bagi sebagian kita yang baru mendengar istilah ini dan juga bagi orang-orang yang kurang banyak bersinggungan dengan istilah pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Pemahaman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah banyak di singgung di bab terdahulu, dan untuk memahami serta bagaimana kaitannya antara komunikasi pembangunan dan komunikasi pemberdayaan masyarakat tidak akan lepas dari pemahaman kedua konsep terdahulu tersebut. Kehadiran komunikasi pembangunan dapat dipandang sebagai suatu perwujudan respon kalangan disiplin komunikasi untuk menyumbang dan menerapkan ilmunya, dalam rangka ikut ambil bagian menjawab tantangan dan tuntutan pembangunan. Pada hakekatnya perbedaan lahiriah antara kegiatan komunikasi pembangunan dengan yang “bukan komunikasi pembangunan” nyaris tidak kelihatan. Disebut sebagai komunikasi pembangunan apabila sudah benar-benar dikaitkan dengan tujuan suatu proyek pembangunan secara khusus atau dan program-program pembangunan nasional secara keseluruhan (Nasution, 1996).

(Ginanjar Kartasasmita) memandang pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan yang berakar kerakyatan bertitik tolak dari pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena

kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Upaya tersebut harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranatapranaanya. Menanamkan nilai-nilai modern seperti: kerja keras, hemat, keterbukaan, bertanggung jawab, pembaruan lembaga social, dan integrasiannya ke dalam pembangunan, serta peranan masyarakat di dalamnya adalah pokok dari upaya pemberdayaan ini. Penting adanya peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut diri dan masyarakat. Proses pemberdayaan juga mengandung arti melindungi, harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Peningkatan yang dituju tidak hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat: *“peoplecentered, participatory, empowering, and sustainable* (Chambers, 1995). Konsep pemberdayaan masyarakat tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi justru sebaliknya mencoba memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Pemberdayaan betitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan akan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan menjamin pertumbuhan berkelanjutan.

2.2.4 Sejarah Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, point mengenai pemberdayaan menjadi prinsip yang utama dalam rangka membangun masyarakat. Pemberdayaan bermakna “membantu” komunitas atau kelompok masyarakat dengan memberikan sumber daya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas masyarakat meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depannya.

Istilah pemberdayaan selain menjadi prinsip dan nilai yang diterapkan dalam proses pembangunan, saat ini juga telah dipandang sebagai sebuah strategi. Menurut Kartasasmita (1996) pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang ada di dalam paradigma pembangunan yang merangkum dan bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak ke permukaan pada awal tahun 1970-an. Setelah terjadi kritikan pendekatan pembangunan pertumbuhan dan pemerataan yang berlanjut pada pendekatan pembangunan ketergantungan. Konsep ini muncul seiring dengan berkembangnya aliran-aliran seperti *eksetensialisme*, *fenomenologi*, dan *personalisme*. Disusul kemudian masuknya gelombang pemikiran *neo-marxisme*, *freudiansme*, termasuk didalamnya konsep-konsep *elite*, *kekuasaan*, *antikemapanan*, *gerakan populis*, *antistruktur*, *legitimasi*, *ideologi* dan *pembebasan* (Pranaka dan Vidhyandika, 1996).

Menurut Pranarka konsep ini dipandang sebagai bagian atau *sejiwa-sedarah* dengan aliran yang muncul pada abad ke-20 yang dikenal dengan *PostModernisme*.

Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada anti sistem, anti struktur dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Konsep ini muncul sebagai salah satu bentuk perlawanan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan.

Konsep pemberdayaan ini muncul sebagai alternative baru dalam rangka melakukan pembangunan kepada masyarakat. Konsep ini memiliki pandangan bahwa sesungguhnya kekuatan itu bersumber pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, jika ingin menguatkan sebuah negara maka perlu menguatkan kekuatan yang ada didalam masyarakat (Power Masyarakat).

Menurut Parson dalam Hikmat (2013) bahwa konsep Power dalam masyarakat adalah variable jumlah, menurutnya, power masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif. Logikanya, pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negative terhadap kekuasaan.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang berpihak pada masyarakat minoritas (masyarakat miskin dan pedesaan) dibangun dari kerangka logic sebagai berikut (Theresia,2015):

- 1) Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi (paradigma pertumbuhan)
- 2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran.
- 3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi.

- 4) Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah.

Logika berfikir diatas sejalan dengan terminology pemberdayaan itu sendiri, yaitu terminology dari istilah empowerment yang berawal dari kata daya (power). Konsep ini muncul karena lingkaran awal yang terbentuk dari paradigma pembangunan pertumbuhan dimana yang kaya akan semakin kaya begitu pun masyarakat miskin akan terus hidup dengan kemiskinannya.

Sedangkan Thomas (1992) menyebutkan bahwa pemberdayaan merupakan power yang diberikan kepada masyarakat terpinggirkan melalui ilmu pengetahuan dan memberikan kesempatan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan.

Dalam Craig dan Mayo (1995) disebutkan bahwa istilah pemberdayaan merupakan power yang dinegosiasikan sebagai strategi untuk mengadakan perubahan sosial. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perspektif marxis mempengaruhi power dalam masyarakat kapitalis sebagai bagian dari kekuatan ekonomi. Power ini bersinggungan erat dengan kepentingan-kepentingan kapitalis lewat kerjasama baik dalam skala nasional maupun global. Masyarakat miskin harus dapat diberdayakan untuk dapat berpartisipasi lebih efektif dalam proyek-proyek pembangunan baik yang dicanangkan dan diinisiasi oleh lembaga swadaya masyarakat maupun

pemerintah. Sehingga kemampuan masyarakat miskin tidak lagi dibatasi oleh gerakan-gerakan kapitalis.

Mengacu pada konsep yang telah disampaikan diatas, bahwa pemberdayaan merupakan konsep yang selalu berkaitan erat dengan gerakan yang berpusat pada masyarakat, partisipasi dan keadilan. Dengan demikian dalam pemberdayaan, control individu menjadi sangat penuh terhadap hak-haknya baik dalam bidang politik, ekonomi, agama, sosial dan lainnya. Begitupun dengan partisipasi menjadi komponen penting dalam pembangkitan dan proses pemberdayaan. Tanpa adanya kontribusi dan keinginan dari masyarakat, maka pemberdayaan akan menjadi sesuatu yang kosong.

Menurut McArdle dalam Hikmat (2013) disebutkan bahwa pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen menjalankan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan suatu “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Akan tetapi pendefinisian konsep tersebut bukan berarti tidak ada ketergantungan dari pihak luar melainkan bermakna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan 22 prinsip-prinsip yang dikembangkan Ife dalam pengembangan masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain

memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Theresia, 2015).

Hal ini berarti dalam kacamata pemberdayaan, seseorang itu dianggap memiliki kemampuan maupun kompetensi sehingga perlu dikuatkan agar kemampuan yang ada dalam dirinya semakin meningkat untuk kemandirian dirinya sendiri. Selama ini, dalam paradigm pertumbuhan ekonomi, masyarakat pinggiran dianggap tidak mampu melakukan apapun selain hanya menjadi pekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga siklus kehidupan mereka hanya akan berputar disekitaran memenuhi kebutuhan hidup semata dan perbaikan jangka panjang terabaikan.

Oleh karena itu, para pakar yang mendorong untuk menguatkan potensi masyarakat mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang ada sehingga keluar dari belenggu kemiskinan serta menguatkan posisi masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

Menurut Sumodiningrat (2007) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat meliputi dua pihak yaitu pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (pelaku pemberdayaan).

Sehingga dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat, tidak menafikkan keberadaan pihak eksternal, melainkan tetap masyarakat sebagai pengambil keputusan utama.

Akan tetapi yang perlu diingat, bahwa pemberdayaan bukan saja semata-mata menguatkan potensi masyarakat melainkan bagaimana penguatan

individu sebagai kelompok masyarakat dan juga pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat. Sehingga sistem yang terbangun dalam rangka pemberdayaan meliputi seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Menurut Theresia (2015) pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus mengikuti beberapa pendekatan sebagai berikut:

- 1) Upaya itu harus terarah, dengan kata lain upaya yang dilakukan oleh kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Program yang dilakukan harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
- 3) Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Lebih lanjut mengenai definisi pemberdayaan disampaikan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang bertujuan mendorong penduduk miskin secara kolektif terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Masyarakat miskin bukan sebagai objek melainkan subjek dalam pembangunan.

Sementara itu World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara dan menyuarakan pendapat, ide, gagasan, serta

kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk tindakan, dll)

2.2.5. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli

Pemberdayaan yaitu suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau (*strengthening*) penguatan terhadap masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas, kemandirian maupun kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui kegiatan maupun program dengan adanya pendampingan. Pemberdayaan memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dengan memberikan motivasi, pengarahan, serta menggali potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan.

Istilah pemberdayaan dapat diartikan dengan usahan untuk saling meningkatkan kemampuan masyarakat (miskin, terpinggirkan) dalam mengelola suatu kelembagaan masyarakat demi memperbaiki kehidupan. Dari penjelasan tersebut dapat kita katakan bahwa pemberdayaan yaitu sebuah perbaikan kualitas atau kesejahteraan individu dan masyarakat baik perbaikan perekonomian dan kesejahteraan dalam segi kesehatan dan pendidikan.

Menurut Rusli pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara atau pendapat mereka dengan memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan keahlian di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja organisasi.

Menurut Soetomo pemberdayaan merupakan tindakan untuk mengubah suatu keadaan masyarakat dimana standar hidupnya sangat rendah ke kondisi yang lebih baik dalam hal ekonomi, sosial budaya dan politik. Pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan, mengenai kesejahteraan merupakan idaman setiap orang dan setiap negara. Kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang diidamkan.

Menurut Zubaedi pemberdayaan yaitu upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, hal ini berarti masyarakat diperdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Menurut Suharto berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses dan tujuan. Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat sebuah proses yaitu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, dengan adanya pemberdayaan diharapkan merubah keadaan sosial, dimana masyarakat yang bedanya memiliki pengetahuan atau kekuasaan dan mampu dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti menyampaikan pendapat, kepercayaan diri, mempunyai pekerjaan, mandiri dalam melaksanakan tugas bahkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau empowerment dapat diartikan sebagai penguatan, dan secara teknis pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.

Menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim, pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.

Menurut Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, pengetahuan, kesempatan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.

Menurut Toto Mardikanto pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan atau memperkuat keberdayaan, dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Menurut Direktorat Jenderal pemberdayaan merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

Dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa disebutkan mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan adalah memberikan suatu daya atau kekuatan

kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi meningkatkan kualitas hidupnya.

2.2.6. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Seperti yang telah diuraikan diatas, pemberdayaan pada hakikatnya adalah upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan kompetensi yang dimiliki sehingga menjadi jalan perubahan bagi kehidupannya. Oleh karena itu, terkait dengan pembangunan, maka pemberdayaan merujuk pada upaya-upaya untuk perbaikan, terutamaperbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial budayanya.

Oleh karena itu, menyangkut konsep-konsep pemberdayaan diatas, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut (Theresia, 2015):

1) Perbaikan kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Perbaikan ini akan mencakup kemampuan orang yang terlibat didalamnya, komponen kepentingan dimana masing-masing pihak memiliki satu kepentingan, komponen aturan yang meliputi seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, serta komponen struktur dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar.

2) Perbaikan usaha

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan akan mencakup perbaikan dalam rangka mengembangkan usaha menjadi bisnis yang

berkelanjutan. Meliputi, studi kelayakan, pembentukan badan usaha, manajemen SDM dan keuangan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

3) Perbaikan pendapatan

Dengan terjadi perbaikan bisnis yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka akan berdampak pada pendapatan yang akan diperoleh bagi keluarga dan masyarakat yang terlibat didalamnya.

4) Perbaikan lingkungan

Sejalan dengan perbaikan yang terjadi karena proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, maka setelah pendapatan meningkat, maka akan berkorelasi dengan perbaikan lingkungan. Peningkatan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5) Perbaikan kehidupan

Dengan terjadinya perbaikan di sector pendapatan, usaha dan lingkungan maka akan berdampak pada sector kehidupan manusia secara keseluruhan.

6) Perbaikan masyarakat

Tujuan akhir ini berarti bahwa manusia secara individu memiliki kehidupan yang baik akan berdampak pada perannya sebagai makhluk sosial untuk berperan penuh dalam memajukan masyarakat.

2.2.7. Tahapan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan

masyarakat, penyempurnaan mekanisme pembangunan perlu dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian.

- 1.) Perencanaan program pemberdayaan masyarakat.
 - a. Menajamkan sasaran pembangunan melalui kegiatan perencanaan pembangunan.
 - b. Memperkuat penggunaan sumber daya dana dan penyalurannya sebagai tahapan dalam perencanaan
 - c. Pembentukan kelompok dan penguatan potensi kelompok dalam memanfaatkan sumber daya manusia maupun dana.
- 2.) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
 - a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memilih dan menjalankan usaha yang diinginkannya.
 - b. Memperkuat kerjasama masyarakat dengan pelaku pemberdayaan dan pemerintahan dalam pembangunan
- 3.) Pengendalian program pemberdayaan masyarakat

Melengkapi pencatatan sebagai dasar pengendalian dan penyusunan informasi dasar yang lengkap, operasional yang bermanfaat bagi evaluasi program yang akan datang.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disampaikan oleh Widyaastuti dalam Theressia (2015) sebagai berikut:

1) Penetapan dan pengenalan wilayah

Dalam pengenalan wilayah biasanya dilakukan melalui:

- a. Survey Mandiri

Survey yang dilakukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan, meskipun dalam prakteknya masyarakat akan dibantu atau didampingi oleh fasilitator program

b. Penilaian keadaan

Merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif oleh masyarakat. Sedangkan peran pihak luar sebagai fasilitator. Adapun yang dinilai pada tahapan ini terdiri dari; (1) pemetaan wilayah, (2) analisis keadaan berupa keadaan sekarang, masa lalu, identifikasi perubahan, identifikasi akar masalah, SWOT terkait dengan kondisi lingkungan dan pemecahan masalah, (3) pemilihan alternative pemecahan masalah, (4) rincian tentang stakeholder, (5) analisis situasi, yang disampaikan secara deskriptif maupun matrik, (6) analisis masalah yang merupakan penyebab terjadinya gejala-gejala yang tidak diinginkan sebagai bahan membuat rekomendasi.

c. Analisis dan pemetaan sosial

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali kondisi sosial budaya masyarakat lokal atau disebut juga sebagai kegiatan orientasi sosial dan wilayah. Meliputi kondisi sosial, demografi, nilai-nilai, kebiasaan, masyarakat, dll.

2) Sosialisasi kegiatan

Dapat dilakukan melalui aktivitas komunikasi yang meliputi komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa maupun komunikasi dengan memanfaatkan media baru.

3) Penyadaran masyarakat

Berbeda dengan sosialisasi kegiatan yang lebih fokus pada pesan edukatif, penyadaran masyarakat dilakukan untuk menumbuhkembangkan keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat. Biasanya metode pesan yang digunakan pada tahapan ini bersifat provokatif.

4) Perorganisasian masyarakat

Menurut Ross, pengorganisasian masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat mengidentifikasi kebutuhan atau tujuantujuannya, mengembangkan kepercayaan diri dan kemauan untuk berkerja dalam memenuhi kebutuhan, menemukan sumber daya (internal/eksternal), untuk menangani kebutuhan-kebutuhan, mengambil tindakan, dan mengembangkan sikap kooperatif dan kolaboratif dan praktik di masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian masyarakat yaitu prinsip kebutuhan, kepemimpinan, partisipasi, komunikasi, struktur dan evaluasi.

5) Perencanaan kegiatan

Perencanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pernyataan tertulis tentang masalah, cara mencapai tujuan, volume (unit dan frekuensi) kegiatan, pelaku kegiatan, penerima manfaat, metode, perlengkapan atau sarana/prasarana yang akan digunakan, lokasi, waktu serta jumlah dan sumber pembiayaan.

6) Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang identic dengan perubahan sosial melalui pendidikan. Oleh karena itu sejak awal dan selama proses pelaksanaan kegiatan harus dilakukan pelatihanpelatihan. Berbeda dengan pelatihan konvensional, pelatihan yang dimaksud dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dirancang sebagai “pelatihan partisipatif”.

2.2.8. Ruang Lingkup Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat

Adapun ruang lingkup aktivitas pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan usaha, termasuk didalamnya usaha kecil menengah maupun usaha keluarga
- 2) Efisien sistem produksi pada usaha masyarakat
- 3) Efisien sistem pemasaran produksi
- 4) Pengembangan sumber daya keluarga (anak dan perempuan)
- 5) Pengembangan organisasi dan administrasi
- 6) Pengembangan program-program yang berkaitan dengan lingkungan
- 7) Program-program yang berkaitan aspek ekonomi, sosial budaya, agama, politik dan sebagainya,
- 8) Program peningkatan kunjungan wisata
- 9) Gagasan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang tinggi melalui program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

2.2.9. Komunikasi Lingkungan

Robert Cox dalam bukunya *Environmental Communication and The Public Sphere*, mengemukakan bahwa komunikasi lingkungan adalah sarana pragmatis dan konstitusi untuk memberikan pemahaman mengenai lingkungan kepada masyarakat, seperti halnya hubungan kita dengan alam semesta. Ini merupakan sebuah media simbolik yang digunakan untuk menciptakan masalah lingkungan dan negosiasi perbedaan respon terhadap permasalahan Komunikasi Lingkungan. Dengan kata lain komunikasi lingkungan digunakan untuk menciptakan kesepakatan mengenai permasalahan lingkungan (Cox, 2010:20).

Menurut Open (2005), komunikasi lingkungan adalah rencana dan strategi melalui proses komunikasi dan produk media untuk mendukung efektivitas pembuatan kebijakan, partisipasi publik, dan implementasinya pada lingkungan (Open, 1999). Dalam pengertian Open dapat dipahami bahwa komunikasi lingkungan menjadi komponen yang terintegrasi dalam kebijakan. Program komunikasi seharusnya tidak sekedar berorientasi sumber dan media - centric belaka. Harus ada partisipasi besar dari penerima atau dari masyarakat. Program komunikasi lingkungan mutlak harus fokus memberdayakan audien, melibatkannya, dan bukan menempatkannya pada posisi yang pasif. (Yenrizal, 2015).

2.3. Tarsius Center Indonesia (TCI)

Gambar 2. 1

Logo Tarsius Center Indonesia



Sumber: tarsiuscenterindonesia.org

Tarsius Center Indonesia adalah komunitas non-pemerintah yang berfokus pada pengembangan masyarakat, konservasi lingkungan, dan pelestarian budaya. Dengan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Tarsius Center Indonesia (TCI) lahir dari keyakinan bahwa keberlanjutan masa depan merupakan akumulasi dari kebaikan kualitas hidup seluruh makhluk hidup, yang telah diupayakan sejak saat ini. Keterkaitan manusia dengan alam dalam mata rantai kehidupan dipandang perlu untuk menyelesaikan permasalahan sehari – hari. Pengembangan masyarakat bersama multi-stakeholder menjadi beberapa cara TCI

turut mendorong kapasitas masyarakat, mengelola sumber daya untuk menciptakan kualitas kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tarsius Center Indonesia merupakan transformasi dari lembaga yang sebelumnya bernama Kleompok Peduli Lingkungan Belitung (KPLB). TCI merupakan sebuah yayasan dan telah terdaftar di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan Tarsius Center Indonesia melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ini membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan. Serta memanfaatkan media lokal, seperti radio komunitas dan surat kabar daerah, untuk menyebarluaskan informasi mengenai program dan kegiatan yang dilakukan. Ini membantu menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Serta mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, seperti kewirausahaan, pertanian berkelanjutan, dan konservasi lingkungan. Melalui kegiatan-kegiatan ini Tarsius Center Indonesia tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada masyarakatnya.

2.4. Kerangka Teoritis

2.4.1. Teori Jim Ife

Menurut Jim Ife, Konsep Pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Pemberdayaan juga merupakan proses pemberian sumber daya, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan

dan masa depannya sendiri. Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan post-strukturalis.

Dalam buku Pengembangan Masyarakat Karya Zubaedi (2013:21-23), penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut.

Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif.

Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi. Menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang dan kalah.

Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pekabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.

Ketiga, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis.

Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Permasalahan yang sering terjadi pada program pemberdayaan masyarakat bahwa keempat perspektif yang disampaikan oleh Jim Ife (dalam Zubaedi, 2013), tidak diterapkan secara bersamaan sehingga menyebabkan ketiadaan daya dan ketimpangan. Ketimpangan ini dapat menimbulkan ketidakberdayaan pada masyarakat. Oleh karena itu peneliti.

2.4.2. Teori ACTORS

Teori "ACTORS" tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997) lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain:

- (a) mendorong adanya ketabahan;
- (b) mendelegasikan wewenang sosial;
- (c) mengatur kinerja;
- (d) mengembangkan organisasi (baik lokal maupun eksteren);
- (e) menawarkan kerjasama;
- (f) berkomunikasi secara efisien;
- (g) mendorong adanya inovasi; dan

(h) menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kerangka kerja pemberdayaan dapat dilihat dari akronim "ACTORS" antara lain terdiri dari:

A= *authority* (wewenang) dengan memberikan kepercayaan

C= *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan)

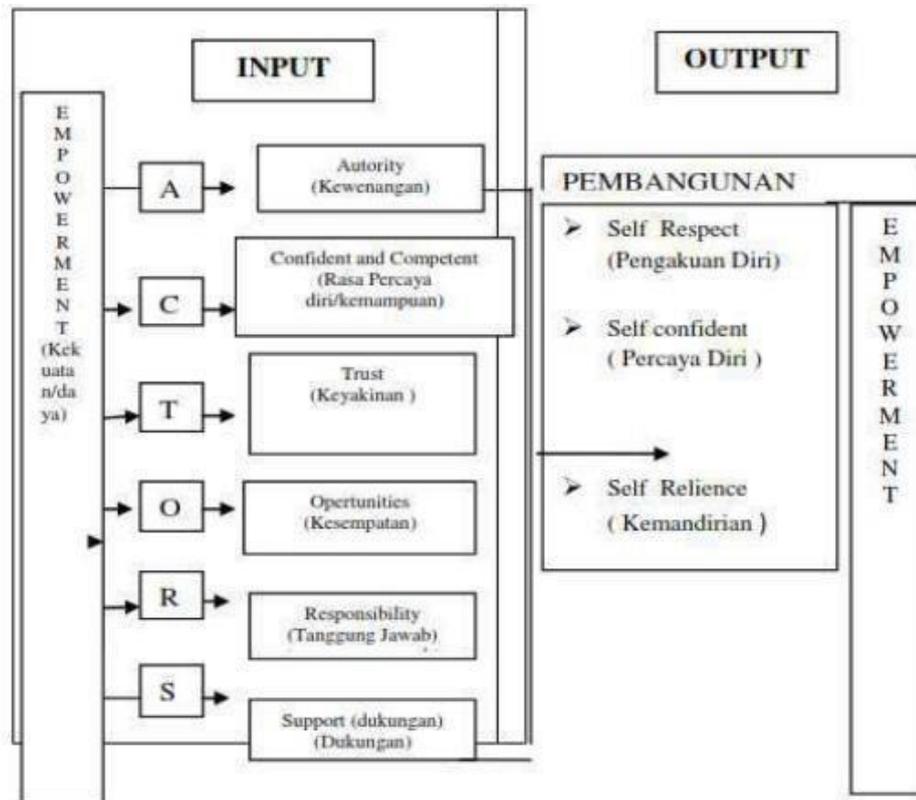
T= *trust* (keyakinan)

O= *opportunities* (kesempatan)

R= *responsibilities* (tanggung jawab)

S = *support* (dukungan)

Gambar 2. 2 Kerangka Kerja Teori ACTORS



Sumber: Karjuni Dt. Maani (2011).

Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum.

Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” adalah sebagai berikut:

- 1) *Authority*, kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik.
- 2) *Confidence and competence*, menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan.
- 3) *Trust*, menimbulkan keyakinan bahwa Mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya.
- 4) *Oppurtunities*, memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih pada apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada di diri masyarakat.
- 5) *Responsibilities*, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan
- 6) *Support*, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

Dengan menggunakan kerangka kerja ACTORS tersebut, guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat, akan dapat dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari inner dan inter masyarakat. Di mana pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai aktornya. Di negara-negara berkembang peranan pemerintah sangatlah penting karena pemerintah berperan:

- 1) Menggali, menggerakkan, dan mengombinasikan faktor sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, biaya, peralatan, partisipasi dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peran sentral dalam pembangunan masyarakat yaitu dengan menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, operasional, dan teknis;
- 2) Pemerintah berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melakukannya sendiri, misalnya dalam hal perencanaan, awalnya pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat (*planning for the community*), kemudian perencanaan bersama masyarakat (*planning with the community*), dan akhirnya perencanaan oleh masyarakat (*planning by the community*); dan
- 3) Pemerintah dapat juga melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang dapat berfungsi memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan melakukan hal-hal lain guna meningkatkan keberhasilan pembangunan.

2.5. Kerangka Pemikiran

Robert Cox dalam bukunya *Environmental Communication and the Public Sphere*, mengemukakan bahwa komunikasi lingkungan adalah sarana pragmatis dan konstitutif untuk memberikan pemahaman mengenai lingkungan masyarakat, seperti halnya hubungan kita dengan alam semesta.

Seseorang pakar perencanaan komunikasi Middleton membuat definisi dengan menyatakan “strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dengan semua

elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan komunikasi yang optimal. Effendy (2005) dalam buku berjudul dimensi – dimensi komunikasi menyatakan bahwa: “strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan”.

Strategi komunikasi lingkungan adalah rencana dan strategi melalui proses komunikasi dan produk media untuk mendukung efektivitas pembuatan kebijakan, partisipasi publik, dan implementasinya pada lingkungan. Dalam pengertian Oepen dapat dipahami bahwa komunikasi lingkungan menjadi komponen yang terintergritas dalam kebijakan. Selanjutnya, Robert Cox mengemukakan bahwa strategi komunikasi lingkungan adalah sarana pragmatik dan konstitutif untuk memberikan pemahaman mengenai lingkungan kepada masyarakat, seperti halnya hubungan kita dengan alam semesta. Ini merupakan sebuah media simbolik yang digunakan untuk menciptakan masalah lingkungan.

Robert Cox menjelaskan dua fungsi komunikasi lingkungan:

- 1) Komunikasi lingkungan adalah pragmatik. Ini bersifat edukasi dan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan komunikasi lingkungan. Awalnya ini berupa instrument komunikasi yang terjadi pada kita, komunikasi dalam tindakan. Penyelesaian masalah dan perdebatan seringkali menjadi bagian dari kampanye edukasi publik.
- 2) Komunikasi lingkungan adalah konstitutif. Komunikasi lingkungan juga membantu dalam representasi alam dan permasalahan lingkungan yang juga merupakan subjek bagi kita.

Dalam hal ini penelitian menggunakan teori Jim Ife. Menurut Jim Ife pemberdayaan masyarakat

Berorientasikan pada kerangka pemikiran yang telah peneliti paparkan, berikut uraian bagan kerangka pemikiran dari permasalahan yang peneliti angkat sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Bagan Kerangka Pemikiran

